

























dan tahapan pilkada Mojokerto tahun 2015 sebagai acuan untuk pelaksanaan Pilkada.

Untuk mengurangi angka golput KPUD Mojokerto melakukan 3 cara yaitu: *pertama*, sosialisasi yang masif kepada masyarakat. *Kedua*, mengajak masyarakat dan organisasi-organisasi agar terlibat di dalamnya. *Ketiga*, mengefektifkan pemberitaan melalui media-media tradisional seperti ledang atau keliling-keliling pada masyarakat untuk mau ikut andil menyuarakan hak politiknya pada pilkada dan juga meminta tolong kepada takmir-takmir masjid untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pada tanggal yang sudah ditentukan akan dilakukan pencoblosan. Dengan cara seperti itu diharapkan masyarakat ikut serta dalam pilkada.

Selain sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Mojokerto kepada masyarakat, KPUD juga memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang bekerja sama dengan Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia). Sosialisasi untuk penyandang disabilitas hanya berfokus kepada tuna netra, karena menurut KPUD penyandang disabilitas lah yang lebih butuh sosialisasi disebabkan oleh keterbatasan penglihatan. Alat peraga yang digunakan KPUD untuk sosialisasi kepada tuna netra adalah Template yang ada huruf braille.

Lalu untuk penyandang disabilitas lain seperti tuna daksa, tuna rungu/wicara tidak begitu membutuhkan sosialisasi. Padahal pada nyatanya, tuna rungu/wicara juga membutuhkan sosialisasi seperti yang dilakukan KPUD untuk tuna netra. Tuna rungu/wicara memang terlihat bisa mengerti tentang pemilu namun realitasnya tidak demikian. Keterbatasan yang dimiliki tuna rungu/wicara

